



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jamaluddin No.1.A Telepon (0323) 323337

email : organisasi@sampangkab.go.id

SAMPANG (69213)

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Nomor : 188/ /KEP/434.032/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2021-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja individu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
4. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.
- Pertama : Indikator Kinerja Individu lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- Kedua : Indikator Kinerja Individu lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang merupakan acuan ukuran kinerja yang dimanfaatkan untuk :
a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
c. Perjanjian Kinerja
d. Laporan Kinerja
- Ketiga : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G
Pada Tanggal: Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG**



YULIADI SETIYAWAN, S.SoS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660711 198809 1 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
Nomor : 188/ ~~123~~ /KEP/434.303/2021
Tanggal : Januari 2021

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Sekretaris Daerah
2. TUGAS : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
3. FUNGSI :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.Nilai EKPPD	EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat. EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EKPPD dan Tim Daerah EKPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, self assessment) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai	Bagian Pemerintahan

		2. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Prokopim i. Bidang Umum	= (jumlah kebijakan daerah / jumlah rumusan kebijakan) x 100%	Semua Bagian
		4. Nilai SAKIP	'=Perencanaan Kienrja (30%) +pengukuran kinerja (25%)+pelaporan kinerja (15%)+Evaluasi Internal(10)+Capaian Kinerja(20%)	Bagian Organisasi (Semua Bagian)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}$	Bagian Organisasi
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi	Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	=(realisasi kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan/kebijakan ekonomi daerah) x 100%;	Bagian Perekonomian

Sampang, Januari 2021
Sekretaris Daerah

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19660711 1988091 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. TUGAS : Membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
3. FUNGSI :
 - a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai EKPPD	EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat. EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EKPPD dan Tim Daerah EKPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, self assessment) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai	Bagian Pemerintahan
		2. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum	= (jumlah kebijakan daerah / jumlah rumusan kebijakan) x 100%	Semua Bagian
		5. Nilai SAKIP	=Perencanaan Kinerja (30%) +pengukuran kinerja (25%)+pelaporan kinerja (15%)+Evaluasi Internal(10)+Capaian Kinerja(20%)	Bagian Organisasi

Sampang, Januari 2021
Plt. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

H. HARUNUR RASYID, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640311 199203 1 007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **JABATAN** : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. **TUGAS** : Membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.
3. **FUNGSI** :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
 - c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa; e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan	= (jumlah kebijakan daerah / jumlah rumusan kebijakan) x 100%	Semua Bagian
		2. Nilai SAKIP	'=Perencanaan Kienrja (30%) +pengukuran kinerja (25%)+pelaporan kinerja (15%)+Evaluasi Internal(10)+Capaian Kinerja(20%)	Bagian Organisasi (Semua Bagian)

3	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	=(realisasi kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan/kebijakan ekonomi daerah) x 100%;	Bagian Perekonomian
---	--	--	---	---------------------

Sampang, Januari 2021
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Drs. NURUL HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **JABATAN** : Asisten Administrasi Umum
2. **TUGAS** : Membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.
3. **FUNGSI** :
 - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
 - b. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;;
 - f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Organisasi b. Bidang Prokopim c. Bidang Umum	= (jumlah kebijakan daerah / jumlah rumusan kebijakan) x 100%	Semua Bagian
		Nilai SAKIP	'=Perencanaan Kienrja (30%) +pengukuran kinerja (25%)+pelaporan kinerja (15%)+Evaluasi Internal(10)+Capaian Kinerja(20%)	Bagian Organisasi (Semua Bagian)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}$	Bagian Organisasi

Sampang, Januari 2021
Asisten Administrasi Umum

H. ABD,HANNAN, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630111 198603 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Bagian Organisasi
2. TUGAS : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
3. FUNGSI : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Terlaksananya pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi	Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Organisasi	= (jumlah kebijakan daerah / jumlah rumusan kebijakan) x 100%	Semua Subbag

	pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi	2. Nilai SAKIP	=Perencanaan Kinerja (30%) +pengukuran kinerja (25%)+pelaporan kinerja (15%)+Evaluasi Internal(10)+Capaian Kinerja(20%)	Subbag Kinerja dan RB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}$	Subbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana

Sampang, Januari 2021
Kepala Bagian Organisasi

Drs. IMAM SANUSI, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19630727 198803 1 005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2. TUGAS : a. Menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
- b. Menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi Perangkat Daerah;
- c. Menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis daerah;
- d. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
- e. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- f. Menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat Daerah;
- g. Menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Terlaksananya penyiapan dan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta bimbingan teknis di bidang dan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah OPD yang menyusun Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan - Jumlah OPD yang menyusun Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan - Jumlah OPD yang di Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - 39 OPD - 39 OPD - 39 OPD 	<p>1 tahun sekali/setiap ada perubahan SOTK</p> <p>1 tahun sekali/setiap ada perubahan SOTK</p> <p>Setiap ada perubahan peraturan/</p>

Sampang, Januari 2021
Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

SRI NOER HIDAYATI NINGSIH, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19801114 200604 2 024

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana

2. TUGAS :

- a. Menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik ;
- d. Menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Terlaksananya penyiapan dan penyusunan pedoman pembinaan serta bimbingan teknis di bidang Pelayanan Publik dan Tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah OPD yang mengikuti pameran Pelayanan Publik - Jumlah Buku Perbup Kode Wilayah - Jumlah Buku Perbup Pakaian Dinas - Jumlah pembuatan ID Card/Keplek 	<p style="text-align: center;">1 unit kerja/ OPD</p> <p style="text-align: center;">60 Buku</p> <p style="text-align: center;">60 Buku</p> <p style="text-align: center;">1200 Buah</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah OPD dan unit kerja yang dilakukan Monev Pelayanan Publik - Jumlah OPD yang menyusun IKM 	<p style="text-align: center;">39 OPD dan 22 puskesmas dan 2 RSD</p> <p style="text-align: center;">39 OPD</p>	

Sampang, Januari 2021
Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan
Tata Laksana

EDY SANTOSO, S. Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690705 199302 1 006

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2. TUGAS : a. Menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- b. Menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;
- c. Menyusun road map reformasi birokrasi;
- d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Terlaksananya penyiapan dan penyusunan pedoman pembinaan serta bimbingan teknis di bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah OPD yang sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi - Jumlah Unit Kerja yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM - Jumlah OPD yang mengikuti Kompetisi Budaya Kinerja Tk. Provinsi Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - 39 OPD - 2 OPD/unit kerja - 1 OPD/unit kerja 	<p>1 kali 1 tahun</p> <p>1 kali 1 tahun</p> <p>1 kali 1 tahun</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu - Jumlah Laporan Kinerja OPD yang berkualitas dan tepat waktu 	<p>1 LKjIP</p> <p>39 LKjIP</p>	<p>1 kali 1 tahun</p> <p>1 kali 1 tahun</p>

Sampang, Januari 2021
Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

ERNA EKAWATY, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19790621 200604 2 020

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Analis Organisasi
3. TUGAS : a. Menganalisis dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
- b. Menganalisis dokumen anjab organisasi Perangkat Daerah;
- c. Menganalisis dokumen hasil penyusunan evaluasi jabatan organisasi Perangkat Daerah;
- d. Menganalisis dokumen peta jabatan organisasi Perangkat Daerah;
- e. Menyusun SPJ sub kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Terselesainya dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan sesuai dengan pedoman	- Jumlah dokumen Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan OPD yang sudah dianalisa sesuai kebutuhan	39 dok	1 kali 1 tahun
		- Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan OPD yang sudah dianalisa sesuai Permenpan	39 dok	1 kali 1 tahun
		- Jumlah dokumen Kelembagaan OPD yang sudah dianalisa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	39 dok	1 kali 1 tahun

Sampang, Januari 2021
Analis Jabatan

SITI HALIMAH, S.Sos
NIP. 19770325 200701 2 006

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Analis Organisasi
2. TUGAS : a. Menganalisis dokumen pelayanan publik OPD;
 b. Menganalisis hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD;
 c. Menelaah penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur OPD;
 d. Menganalisis peraturan terkait pakaian dinas;
 e. Menganalisis peraturan terkait kode wilayah ;
 f. Menganalisis peraturan terkait tata naskah dinas;
 g. Menyusun SPJ sub kegiatan Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
 h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Terselesainya dokumen ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sesuai dengan pedoman	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen OPD yang mengikuti pameran Pelayanan Publik sesuai ketentuan - Jumlah draft Buku Perbup Kode Wilayah sesuai pedoman - Jumlah draft Buku Perbup Pakaian Dinas sesuai pedoman - Jumlah data PNS pembuatan ID Card/Keplek 	<p style="text-align: center;">1 dok</p> <p style="text-align: center;">1 dok</p> <p style="text-align: center;">1 dok</p> <p style="text-align: center;">1200 data</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen OPD dan unit kerja yang dilakukan Monev Pelayanan Publik - Jumlah dokumen OPD yang menyusun IKM 	<p style="text-align: center;">39 dok OPD dan 22 dok puskesmas dan 2 dok RSD</p> <p style="text-align: center;">39 dok</p>	

Sampang, Januari 2021
Analis Organisasi

SURYANING HATI,S.AP
NIP. 19780112 200801 2 015

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Analis Akuntabilitas
2. TUGAS : a. Menganalisis dokumen Reformasi Birokrasi;
b. Menganalisis dokumen Rencana Aksi OPD;
c. Menganalisis Proses bisnis Kabupaten dan OPD;
d. Menganalisis dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD;
e. Menyusun SPK sub kegiatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Terselesaikannya dokumen Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan pedoman	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi OPD yang sudah di analisa sesuai dengan pedoman- Jumlah dokumen Unit Kerja yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang sudah di analisa sesuai dengan pedoman- Jumlah dokumen OPD yang mengikuti Kompetisi Budaya Kinerja Tk. Provinsi Jawa Timur yang sudah di analisa sesuai dengan pedoman	<p style="text-align: center;">39 dok</p> <p style="text-align: center;">2 dok</p> <p style="text-align: center;">2 dok</p>	

Sampang, Januari 2021
Analis Akuntabilitas

ENDAH SUSANTI, SE
NIP. 19640515 199203 2 006